

**Analisis Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional pada masa wabah pandemi
(Covid-19) Terhadap Industri Parawisata Sektor Perhotelan**

Murniati Tobing
Universitas Sumatera Utara
Alamat Korespondensi : tobingmurniati@gmail.com

Abstrak

Mayoritas negara-negara di dunia terjangkit wabah Pandemi Corona virus disease 2019, tidak kecuali Indonesia sebagai negara yang berpenduduk terbesar kelima di dunia. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Pandemi Covid-19 terhadap produktivitas sektor Parawista Perhotelan dan Kebijakan Program PEN yang dapat mendukung keberlangsungan hotel. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap tingkat hunian hotel dan tenaga kerja. Wabah Pandemi meningkatkan risiko kesehatan, menimbulkan gangguan Parawisata dan tingkat hunian, meningkatkan beban pengeluaran kesehatan serta mengurangi akses pendidikan dan pelatihan yang dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja dan tingkat hunian sektor hotel. Program PEN mendukung para pengusaha dan produktivitas tenaga kerja sektor perhotelan dan restoran melalui pemberian bantuan Dana Hibah menggunakan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan tambahan alokasi pengurangan beban pajak dan bantuan pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menggelontorkan Dana Hibah Pariwisata sebesar Rp 3,3 triliun bagi pelaku usaha hotel, restoran, dan pemerintah daerah. Dana tersebut tentu menjadi angin segar bagi para pelaku pariwisata, walaupun saat wabah merebak banyak hotel dan restoran tutup.

Kata Kunci : Pemulihan Ekonomi Nasional, Dana Hibah, Akomodasi, Sektor Parawisata Hotel dan Restoran, Covid-19

**Analysis of National Economic Recovery Policy during the Pandemic (Covid19)
Outbreak on the Tourism Industries of Hospitality Sector**

Murniati Tobing
University of Sumatera Utara
Correspondent address: tobingmurniati@gmail.com

Abstract

The majority of countries in the world have been affected by the 2019 Corona virus disease outbreak, including Indonesia as the fifth largest population country in the world. The objective of the research is to determine effects of the Covid-19 pandemic on the productivity of the Tourism Hospitality sector and the PEN (National Economic Recovery) Program Policy that can support the hotel sustainability. The research uses descriptive qualitative research method with secondary data. The results demonstrate that the Covid-19 pandemic has negative effect on hotel occupancy rates and the workforce. Pandemic outbreaks increases health risks, cause disruption to tourism and occupancy rates, increase the burden of health spending and reduce access to education and training which can reduce labor productivity and occupancy rates of hotel sector. The PEN program supports entrepreneurs and labor productivity in the hotel and restaurant sectors through the provision of grants using the distribution of social assistance (bansos) and additional

allocations for reducing tax burdens and government assistance through the Ministry of Tourism and Creative Economy also disbursed a Tourism Grant Fund of 3.3 trillion for business actors, hotels, restaurants and local government. The funds are certainly becomes a breath of fresh air for tourism actors despite during the outbreak a lot of hotels and restaurants are closed.

Keywords: national economic recovery, grants, accommodation, hospitality and restaurants tourism sector, the Covid-19

Pendahuluan

Analisis Kebijakan Publik menurut Carl J.Friedrick mengartikan Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang di usulkan seseorang, kelompok atau Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan hambatan dan kesempatan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan.

Corona Virus Disease (Covid-19) telah menyebar dimana-mana.Semua tingkat kehidupan dunia telah terkena dampaknya hingga lokal dalam kuantitas korban tewas yang banyak. Situasi demikiantelah memaksa Badan Kesehatan Internasioal (WHO) menetapkannya sebagai *Public Health Emergency Of International Concern* (PHEIC). PHEIC pada 30 Januari 2020 didasarkan pada *International Health Regulation* (IHR) tahun 2005 (Pandoman, 2020). Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Virus Corona telah menyebar dengan cepat di 213 Negara. Data yang dipublikasikan pada tanggal 19 April 2020, wabah Corona terhadap masyarakat dunia yang terkonfirmasi terdampak sebesar 2.245.872 jiwa, dengan angka kematian 152.707 jiwa. Akibat fenomena sangat cepatnya penyebaran virus, 20 Negara telah melakukan *lockdown* (isolasi).

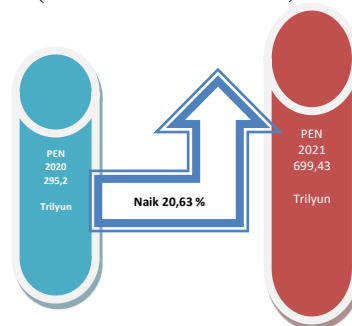
Anggota G20 yang terdiri dari beberapa negara jatuh kedalam jurang resesi. Dan lebih dari setengah negara G20 diprediksi mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. The Economist memperlihatkan bahwa hanya 3 negara G20 yang diprediksi masih menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif di sepanjang tahun 2020 yaitu : Indonesia China dan India. Untuk Indonesia The Economist memprediksi pertumbuhan PDB riil pada tahun 2020 berada pada angka 1 persen,

sementara prediksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto PDB Indonesia sebelum Wabah pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) adalah ; 5,1 persen.

Pandemi COVID-19 telah menjadi fokus diskusi pada pertemuan G20, negara-negara yang tergabung dalam organisasi tersebut menyampaikan empati kepada negara dan penduduknya yang terdampak COVID-19. Keuntungan hotel mengalami penurunan hingga 40% sehingga berdampak pada operasional hotel dan mengancam kelangsungan bisnis. Turunnya pengunjung asing juga berpengaruh terhadap pendapatan Hotel dan rumah makan atau restoran yang pelanggannya lebih dominan adalah para pengunjung dari luar negeri. Lemahnya pertumbuhan pariwisata juga berdampak pada industri retail.

Tentunya proses pemulihan ekonomi akan membutuhkan waktu yang lebih panjang, setidaknya sampai akhir 2021, Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2021 sebesar : 5,70 % Produk Domestik Bruto (PDB).

Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 sebesar : 295,2 Trilyun Terjadi Peningkatan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021 sebesar: 699,43 Trilyun (Kenaikan sebesar 20,63 %)

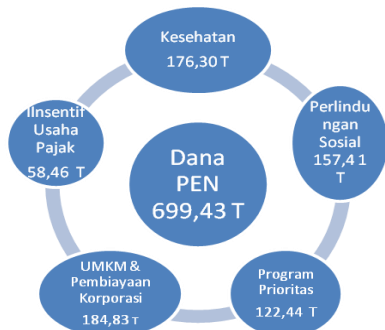


Grafik 1. Kenaikan Dana PEN

Sumber Data : Kementerian Keuangan Tahun 2021

Gelontoran Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Corona Virus Disease 2019 terbagi ke dalam 5 Paket Kebijakan yaitu :

1. Paket Kebijakan Bidang Kesehatan Sebesar : 176,30 Trilyun
2. Paket Kebijakan Bidang Perlindungan Sosial : 157,41 trilyun
3. Paket Kebijakan UMKM dan Pembiayaan Korporasi : 184,83 Trilyun
4. Paket kebijakan Insentif Usaha Pajak : 58,46 Trilyun
5. Paket Kebijakan Program Prioritas : 122,44 trilyun



Grafik 2. Dana Pemulihan Ekonomi Nasional 2021 sebesar : 699,43 Trilyun
Sumber : Kementerian Keuangan (2021)

“Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai 30 April itu mencapai Rp155,6 triliun atau 22,3% dari pagu Rp699,43 triliun,” dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (03/05), di Jakarta.

Tabel 1. Realisasi Dana PEN

Kebijakan	Realisasi (Trilyun)	Persentase %	Pagu (Trilyun)
Kesehatan	21,15 T	12,1 %	176,30 T
Perlindungan Sosial	49,07 T	32,7 T	157,41 T
Program Prioritas	18,98 T	15,3 %	122,44 T
UMKM Pembiayaan dan Korporasi	40,23 T	20,8 %	184,83 T
Insentif Usaha	26,2 T	46,2 %	58,46 T

Sumber Data : Sekretariat Kabinet 2021 (Senin,03/05/2021)

Realisasi Program Kesehatan sebesar Rp21,15 triliun atau 12,1% dari pagunya Rp176,30 triliun.

Realisasi Program Prioritas mencapai Rp18,98 triliun atau Rp15,3% dari pagu Rp122,44 triliun. Realisasi Program Dukungan UMKM dan Korporasi mencapai Rp40,23 triliun atau 20,8% dari pagu Rp184,83 triliun.

Realisasi Program Insentif Usaha Rp26,2 triliun atau 46,2 % dari total pagunya adalah Rp58,46 triliun. Realisasi untuk Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) adalah sebesar Rp49,07 triliun atau 32,7% dari pagu Rp157,41 triliun.

“Khusus perlindungan sosial, program bantuan perlindungan sosial 32,7% atau Rp49,07 triliun dari Rp157,41 triliun. Program lain seperti BLT Desa yang baru 12% diharapkan bisa ditingkatkan kembali,” Sumber Data : Situs Sekretarian Kabinet (Senin 03/ 05 2021)

Dampak COVID-19 pada sektor pariwisata juga tidak luput dari ancaman. Data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik menjelaskan pada tahun 2019 pelancong asing asal China yang datang ke Indonesia menyentuh angka 2.07 juta pelancong atau sebesar 12.8% dari jumlah keseluruhan wisatawan asing sepanjang 2019, bahwa berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke Indonesia pada triwulan I 2020 turun drastis hanya sejumlah 2,61 juta kunjungan, berkurang 34,9 persen bila dibanding tahun lalu. Hal ini sejalan dengan adanya larangan penerbangan antar negara yang mulai diberlakukan pada pertengahan Februari tahun 2019 yang lalu. Jumlah penumpang angkutan rel kereta api dan udara juga tumbuh negativ seiring dengan diberlakukannya PSBB dan PPKM Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat di pertengahan tahun 2021.

Pembatasan aktivitas sosial, isolasi diri, dan larangan bepergian telah menyebabkan banyak penduduk kehilangan pekerjaan. Jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan menyebabkan ancaman terhadap kehidupan sosial. Di samping itu, pandemi Covid-19 menciptakan tantangan terhadap isu sosial dan dampak kehidupan sosial dan kerentanan sosial ekonomi. Dampak Covid-19 terhadap aspek ekonomi cukup masif. Tindakan karantina di wilayah darat,

perairan, dan udara dalam skala lokal maupun internasional menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang stagnan di semua sektor. Situasi ini berdampak pada rendahnya produktivitas karena rendahnya permintaan dan rendahnya penggunaan transportasi terutama untuk keperluan impor dan ekspor. Hal ini mengakibatkan tingkat pengangguran yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi global semakin memburuk selama penyebaran wabah Covid-19. Rendahnya produktivitas tenaga kerja juga terjadi di Indonesia. Jumlah pengangguran juga tinggi dan penggunaan transportasi rendah. Hal-hal tersebut sangat mempengaruhi lambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Tinjauan Pustaka Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Sukirno (2010:9) mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Todaro (2000:137) menyatakan proses perkembangan pertumbuhan ekonomi mempunyai tiga komponen utama yaitu : (1) Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. (2) Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja, (3) Kemajuan teknologi, Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil atau dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi apabila ada kenaikan output perkapita. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Rumus dari laju pertumbuhan ekonomi sebagai berikut

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana 1 menunjukkan tahun berjalan, dan t-1 tahun sebelumnya

Pembangunan ekonomi yang berkualitas mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja. Di sisi lain produktivitas tenaga kerja memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk daya saing sektor tertentu dan seluruh perekonomian, dan membantu menciptakan kondisi yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi. Peningkatan produktivitas tenaga kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia. Dunia telah diperhadapkan pada perubahan teknologi yang sangat cepat di era digital. Pemanfaatan teknologi memungkinkan perluasan marketing, perluasan kesempatan kerja dan fleksibilitas di dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Di samping itu pemanfaatan teknologi digital dapat mempercepat proses pemulihan bisnis dengan membangun mata rantai pasokan, komunikasi dan budaya, serta menggunakan teknologi digital untuk transaksi.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan rangkaian prosedur tahapan atau cara sistematis yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah penulisan jurnal, sehingga dapat menghasilkan sebuah jurnal yang berkualitas yaitu jurnal yang memenuhi syarat penelitian (Soemitro, 1990). Jenis penelitian dalam jurnal ini adalah litereratau penelitian perpustakaan (library research), artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan jurnal ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik) (Hadi, 1980). Dalam penulisan jurnal ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dalam pengolahan dan analisa data tidak menggunakan angka-angka, simbol dan atau variabel matematis melainkan dengan pemahaman mendalam

(in depth analysis). Dalam pembahasannya penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas (Soemitro, 1985). Pendekatan yuridis-normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui hukum positif, yaitu menelaah aturan-aturan hukum positif untuk menemukan keseimbangan pemerintah dalam menyusun peraturan dalam penanggulangan bencana skala pandemi yang disebabkan Pandemi Covid-19. Selain itu menelaah secara normatif tentang pelaksanaan Kebijakan Pemerintah tersebut. Penulisan jurnal ini bersumber pada bahan penelitian primer dan penelitian sekunder, yaitu (Arikunto, 2000): Penulis juga meneliti dari bahan-bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti UUD 1945; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan); Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Analisis Dan Pembahasan

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Guna menjaga stabilitas dan memulihkan ekonomi nasional, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk tetap mendukung UKM di masa pandemi. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan amanat dari Peraturan Pengganti Undang-undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan antara lain insentif pajak, subsidi bunga dan penjaminan modal kerja baru UMKM (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional, 2020). Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengakibatkan masyarakat merasakan keresahan dan kerugian yang berdampak pada kesehatan maupun perekonomian, sehingga, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran Pandemi Covid-19. Darisektor pertanian tak luput menjadi sorotan karena memiliki kaitan erat dengan ketahanan pangan nasional. Tentunya pada masa pandemi yang sulit seperti sekarang ini ketahanan pangan menjadi sesuatu yang harus diupayakan untuk menghindar dari krisis pangan yang seakan menghantui Indonesia. Pemerintah juga tidak melupakan betapa pentingnya sektor pangan dalam penanganan pandemi, apabila hal ini terlewatkan dapat mengakibatkan keributandikarenakan tingginya harga bahan pangan dimasa pandemi. Kegiatan utama yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan perubahan pola rantai pasok pangan, meningkatkan fasilitas produksi dan konsumsi di sektor pangan serta optimalisasi distribusi pangan.

Kita ketahui bersama bahwa Pariwisata Bali yang merupakan destinasi wisata international, menjadikan pariwisata sebagai komoditi utama sehingga dampak pandemi sangat terasa bagi perekonomian Bali dan juga pelaku pariwisata di dalamnya, seperti hampir sekitar 98% objek wisata, hotel, restoran, spa dan fasilitas pariwisata ditutup untuk umum. Oleh karena itumembawa keterpurukan yang sangat hebat bagi perekonomian rakyat Bali sendiri, dengan meningkatnya pengangguran dan juga masalah yang dihadapi oleh manajemen hotel untuk keberlangsungan hotel mereka karena biaya operasional hotel seperti kebersihan, air,

listrik, dan perawatan gedung harus tetap berjalan walaupun tidak beroperasi (Asmoro et al., 2020) Pemerintah tidak dapat melakukan banyak hal pada sector ini mengingat pola penyebaran Covid-19 sangat cepat dilokasi wisata yang rentan terjadi kerumunan diantaranya. Kegiatan keagamaan pun turut dibekali kebijakan oleh pemerintah dengan diberlakukannya beribadah dirumah masing-masing terutama dikhususkan daerah yang berzona merah/wilayah yang menerapkan PSBB Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Dalam sektor ini pada awal dikeluarkannya kebijakan tersebut pemerintah mendapatkan penolakan yang cukup keras dari masyarakat. Namun tujuan dari pemerintah sendiri adalah melakukan mitigasi bencana agar tidak menyebar lebih meluas. Dampak yang ditimbulkan oleh segi ekonomi terhadap menurunnya pendapatan masyarakat, maka salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa pemberian perlindungan sosial dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi Covid-19, BLT diberikan kepada kelompok masyarakat paling terdampak pandemi Covid-19, meliputi masyarakat miskin, pekerja informal serta pelaku usaha transportasi. Meskipun niat pemerintah sangat disambut baik oleh masyarakat dengan diberikannya bantuan ini. Pada sektor pendidikan pun tidak luput dalam kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, diatur dalam Ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Ketentuan Penyesuaian UKT, Dana Bantuan UKT Mahasiswa, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Baik orang tua mahasiswa, orang tua siswa dan mahasiswa non perbankan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat Pandemi Covid 19. Terdapat beberapa langkah stimulus berupa kebijakan yang dikeluarkan mendapatkan dampak positif dari kebijakan ini mengingat rendahnya pendapatan sebagian besar penduduk Indonesia di masa Pandemi Covid-19 ini. Pada sektor keuangan, OJK beserta pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus

keuangan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan sektor jasa Parawisata.

Menurut Direktur Jenderal Pariwisata (1976:40) Industri wisata ialah perusahaan penginapan, angkutan wisata, perusahaan biro perjalanan, perusahaan perstauranan dan perusahaan hiburan. Methieson dan Wall (1982:46) mengatakan bahwa peristiwa mencakup tiga elemen utama adalah Schulalard, dalam (Yoeti, 1982:105) memberikan batasan pariwisata yakni *“Tourism is the sum of operations, mainly of an economic nature, which directly related to the entry, stay and movement of foreign inside certain country, city or region”*. Dengan demikian pengeluaran peserta wisata konvensi juga membawa serta istri, anak atau bahkan temannya yang berdampak pada pengeluaran peserta selama mengikuti kegiatan konvensi juga serta membawa istri, anak atau bahkan temannya yang berdampak pada pengeluaran peserta selama mengikuti kegiatan konvensi menjadi lebih besar. Beberapa pengertian untuk kegiatan Meeting, Incentives, Conferencing, Exhibitions (MICE) dihubungkan dengan kegiatan pariwisata Sumber pertumbuhan ekonomi utama dari sisi pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Parawisata Dunia

Organisasi Parawisata Dunia/*United Nation World Torism Organization* (UNWTO) pada bulan Maret 2020 mengumumkan bahwa dampak wabah pandemik coronavirus disease 2019 akan terasa di seluruh rantai nilai parawisata. Sekitar 80 % usaha kecil dan menengah dari sektor parawisata dengan jutaan mata pencaharian di seluru dunia terkena dampak Covid 19. Di dalam merespon wabah pandemik corona virus disease 2019, Organisasi Parawisata Dunia UNWTO *United Nation World Torism Organization* telah merevisi prospek pertumbuhan wisatawan Internasional negatif 1 % hingga 3 %. Hal itu sangat berdampak pada menurunnya penerimaan atau perkiraan kerugian US \$ 30 Milyard sampai dengan US \$ 50 Milyard. Sebelum wabah merebak

wisatawan Internasional di perkirakan tumbuh antara 3 % sampai 4 %. Asia dan Pasifik akan menjadi wilayah yang terkena dampak yang sangat terburuk dengan penurunan kedatangan wisatawan mancanegara antara 9% hingga 12 %.

Pada Maret 2020, *United Nation World Torism Organization* UNWTO melakukan penilaian dampak wabah covid 19 terhadap wisatawan mancanegara/ Internasional. Dan dari hasil assesement nampak bahwa perkembangan wisatawan Internasional sejak tahun 1995 terus mengalami pertumbuhan dengan menunjukkan kekuatan dan ketahanan menghadapi guncangan seperti Virus Covid SARS yakni pada tahun 2003 dan krisis ekonomi global disertaidengan perang Irak pada tahun 2009. Badai ini dapat diatasi dengan cepat sehingga sampai tahun 2019 jumlah wisatawan Internasional/ Mancanegara meningkat menjadi 1,461 juta orang . Belajar dari pengalaman tersebut dalam menangani wabah pandemi SARS dilihat dari sisi ukuran, dinamika pasar perjalanan global, penyebaran geografis Covid 19 dan potensi dampak ekonominya, *United Nation World Torism Organization* UNWTO memperkirakan kedatangan wisatawan Internasional/ Mancanegara bisa menurun 1% hingga 3% pada tahun 2020 secara global, atau turun dari perkiraan pertumbuhan 3% hingga 4%

Parawisata Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Tanah Air pada awal tahun 2020 mengalami penurunan. Selama Januari 2020, kunjungan wisman mencapai sebanyak 1,27 juta kunjungan. Angka ini merosot tajam di 7,62 persen bila dibandingkan jumlah kunjungan turis asing pada Desember 2019 sebanyak 1,37 juta kunjungan. Penurunan jumlah kunjungan turis asing ini utamanya disebabkan oleh mewabahnya Covid-19 yang terjadi pada pekan terakhir Januari 2020. Merosotnya kunjungan turis asing ke Indonesia itu terlihat juga dari data wisman yang datang melalui pintu masuk udara (bandara). Jika dibandingkan dengan kunjungan pada

Desember 2019, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia melalui pintu masuk udara pada Januari 2020 mengalami penurunan sebesar 5,01 persen.

Penurunan bisnis pariwisata dan perjalanan berdampak pada usaha UMKM, dan terganggunya lapangan kerja. Padahal selama ini pariwisata merupakan sektor padat karya yang menyerap lebih dari 13 juta pekerja. Angka itu belum termasuk dampak turunan atau *multiplier effect* yang mengikuti termasuk industri turunan yang terbentuk di bawahnya. Turunnya wisman/wisatawan mancanegara terutama ke Indonesia akan berpengaruh terhadap penerimaan devisa dari pariwisata. Kurang lebih turun US\$1,3 miliar penerimaan devisa dari pariwisata. Tiongkok sebagai Negara asal wisatawan mancanegara terbanyak kedua di Indonesia. Berdasar data Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas), tenaga yang terserap pada usaha-usaha pariwisata terus meningkat. Bukan hanya dari jumlah tenaga kerja, pangsa (share) pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional juga terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa pariwisata dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi tingkat pengangguran. Pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja pada industri pariwisata mencapai 12,74 juta orang atau 10,53 persen terhadap total tenaga kerja nasional yang berjumlah 121,02 juta orang. Tingkat hunian Kamar hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada Januari 2020 mencapai rata-rata 49,17 persen atau turun 2,30 poin dibandingkan dengan Tingkat Hunian Kamar Januari 2019 yang tercatat sebesar 51,47 persen. Begitu pula, jika dibanding Tingkat hunian Desember 2019, Tingkat hunian hotel klasifikasi bintang pada Januari 2020 mengalami penurunan sebesar 10,22 poin. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel klasifikasi bintang selama Januari 2020 tercatat sebesar 1,88 hari, terjadi penurunan sebesar 0,17 poin jika dibandingkan keadaan Januari 2019.

Berikut ini Daftar Jumlah hotel bintang menurut Provinsi 2019

Tabel 2. Banyaknya Usaha, Kamar, Tempat Tidur pada Usaha Akomodasi dirinci menurut klasifikasi akomodasi Tahun 2019

Provinsi	Jumlah Akomodasi yang Tersedia pada Hotel Bintang	Jumlah Kamar yang Tersedia pada Hotel Bintang	Jumlah Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Bintang
Aceh	23	1 854	3 114
Sumatera Utara	130	11 568	20 465
Sumatera Barat	82	4 648	7 344
Riau	90	7 838	21 148
Jambi	36	2 567	3 756
Sumatera Selatan	85	7 259	10 216
Bengkulu	10	591	899
Lampung	22	2 410	3 448
Kepulauan Bangka Belitung	53	3 461	5 508
Kepulauan Riau	127	14 978	19 834
DKI Jakarta	397	55 800	69 236
Jawa Barat	495	48 755	75 098
Jawa Tengah	311	25 630	40 846
DI Yogyakarta	163	16 231	28 552
Jawa Timur	258	27 485	40 373
Banten	125	12 094	17 675
Bali	507	70 146	97 099
Nusa Tenggara Barat	72	5 173	7 991
Nusa Tenggara Timur	30	2 243	3 766
Kalimantan Barat	42	4 390	6 493
Kalimantan Tengah	19	1 534	2 242
Kalimantan Selatan	57	4 655	6 954
Kalimantan Timur	70	7 527	10 599
Kalimantan Utara	6	323	518
Sulawesi Utara	42	3 821	5 605
Sulawesi Tengah	10	786	1 154
Sulawesi Selatan	142	11 932	17 636
Sulawesi Tenggara	21	1 634	2 505
Gorontalo	7	527	787
Sulawesi Barat	7	429	679
Maluku	20	1 254	1 846
Maluku Utara	4	394	671
Papua Barat	18	1 293	1 871
Papua	35	2 519	3 902
Indonesia	3 516	363 749	539 830

Sumber Data : Subdirektorat Statistik Parawisata BPS,(2020)

Survei Hotel Tahunan (VHTL)/ BPS – Statistics Indonesia, Hotels-Survey

Parawisata Sumatera Utara

Propinsi Sumatera Utara masuk dalam 5 Kawasan Super Prioritas Nasional Destinasi Wisata Dunia yakni : Danau Toba. Adapun Destinasi Parawisata Dunia yang menjadi agenda penting pengembangan Super Prioritas Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif adalah : (1). Danau Toba, (2) Likupang, (3) Labuhan Bajo, (4) Borobudur, dan (5) Mandalika, dan masing masing destinasi tersebut memiliki daya dan keunikan pesona tersendiri.

Di Propinsi Sumatera Utara diterapkan model CHSE, yaitu :

Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability (CHSE) Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, Kelestarian lingkungan untuk tetap menjaga dan membendung Wabah Pandemi Corona Virus Disease 2019 di semua akomodasi/ usaha hotel dan restoran.

Tekanan pada Industri Parawisata sangat terlihat langsung pada penurunan yang sangat besar dari kedatangan wisatawan Internasional / Mancanegara dan Domestik dengan pembatalan pembatalan besar besaran dan penurunan pemesanan hotel. Penurunan perjalanan bisnis parawisata dan perjalanan berdampak pada usaha UMKM dan terganggunya lapangan

kerja. Padahal selama ini parawisata merupakan sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja. Data dari Badan Pusat Statistik Jumlah Usaha Hotel Bintang dan Non Bintang di Propinsi Sumatera Utara tahun 2019 tercatat berjumlah 1.191 Usaha. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan parawisata lainnya. Usaha

penyediaan akomodasi dapat berupa Hotel, Villa, Pondok Wisata, Bumi perkemahan, Persinggahan Karavan dan akomodasi lainnya.

Banyaknya Hotel / Akomodasi Sumatera Utara Tahun 2019 berdasarkan kalsifikasi usaha berbintang dan non bintang menurut Direktorat Sumber Data Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 3. Banyaknya Usaha Hotel Kamar, Tempat Tidur berdasarkan Klasifikasi Tahun 2019

Klasifikasi Akomodasi/ Classification	Accommodation Usaha /Establishment Tidur/Bed	Banyaknya / Number of	
		Kamar/Room	Tempat
Berbintang/ Star	130	11.568	20.465
Bintang 5/ 5 Star	9	1.751	3.034
Bintang 4/ 4 Star	20	3.078	5.527
Bintang 3/ 3 Star	48	4.007	7.009
Bintang 2 / 2 Star	28	1.649	2.984
Bintang 1 / Star	25	1.085	1.911
Akomodasi Lainnya/ Non Star	1.061	19.515	31.779
Melati / Jasmine	716	15.481	25.596
Jasa Akomodasi Lainnya / Others Accomodations	345	4.034	6.183
Jumlah/ TOTAL	1.191	31.083	52.244

Sumber Data : Subdirektorat Statistik Parawisata BPS,(2020)

Survei Hotel Tahunan (VHTL)/ BPS – Statistics Indonesia, Hotels-Survey

Statistik Parawisata BPS,(2020) Survei Hotel Tahunan (VHTL)/ BPS – Statistics Indonesia

Hotel terdiri dari Hotel berbintang / Star dan Hotel Non Bintang /Non Star. Dari Data Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara Survei Hotel Tahunan dapat kita lihat bersama Hotel berbintang atau Star dan Hotel Non Berbintang atau Akomodasi Lainnya seperti: Cottage, Villa, Homestay lainnya dari Tahun 2019 dan Tahun 2020.

Tabel 4. Jumlah Akomodasi, Kamar, Tempat Tidur Pada Hotel Berbintang dan Non Bintang

Klasifikasi Akomodasi/ Accommodation Classification	Usaha /Establishment Tidur/Bed	Banyaknya / Number of	
		Kamar/Room	Tempat
Tahun 2019 Berbintang / Star	140	11.577	18.968
Akomodasi Lainnya / Non Star	1.061	20.600	29.647
Tahun 2020 Berbintang / Star	139	12.006	18.500
Akomodasi Lainnya / Non Star	1.286	24.584	33.724

Sumber Data : Statistik Parawisata BPS, Provinsi Sumatera Utara Survei Hotel Tahunan (VHTL) 2021

Dari hasil kajian penelitian peneliti berdasarkan Sumber Data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2021 Propinsi Sumatera Utara terdapat sejumlah penurunan dan kenaikan selama masa wabah pandemi corona virus disease melanda dunia Tahun 2019 Hotel berbintang jumlah : 140 Usaha terjadi Penurunan di Tahun 2020 jumlah: 139 Usaha yakni sebesar 1 %.Tahun 2019 Hotel Non bintang jumlah 1.061 Usaha terjadi Kenaikan di Tahun 2020 jumlah 1.286 Usaha yakni sebesar 12,3 % (Hasil Data Dari Sumber : BPS Parawisata, Hotels-Survey). Berbagai dampak sosial ekonomi dari suatu bencana atau wabah terhadap kehidupan sosial masyarakat berupa kerugian ekonomi termasuk

kerusakan harta benda yang digunakan sebagai mata pencaharian. Harta benda dan mata pencaharian yang telah rusak dapat menurunkan kualitas hidup dan produktifitas ekonomi. Jikapun ada sumbangan ataupun donasi kompensasi atas kerugian finansial dapat menggantikan aset lain yang hilang atau rusak. Disamping itu terdapat pengaruh tidak langsung terutama aliran dana antar unit sosial masyarakat yang disebabkan terganggunya arus produksi , jasa, input ekonomi dan dukungan infrastuktur. Penutupan Usaha setelah terjadi bencana dapat meningkatkan jumlah pengangguran karena korban sulit mempertahankan atau mendapat pekerjaan.

Tabel 5 : Paket Kebijakan Akselerasi Program Sektor Parawisata

Paket Kebijakan & Program	Hasil yang Diharapkan
1. Dana Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang terdampak akibat penurunan tarif pajak hotel dan restoran di daerah 3, 3 Trilyun	A. Dapat menghasilkan Devisa
2. Alokasi Anggaran APBN Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif sebesar 298,5 Milyard	B. Menarik Wisatawan Mancanegara dari Amerika, Australia, Asia dan Eropa
3. Insentif sesuai dengan usulan asosiasi bahwa pajak hotel dan restoran di 10 destinasi wisata tarif pajak di nolkan (0) Insentif Airlines, Travel Agent dalam skema Joint Promotion, kegiatan promosi parawisata/ familion trip and influencer	C. Diharapkan dengan adanya akselerasi skema insentif yang diberikan oleh Pemerintah menjadi Solusi Terbaik bagi sektor Parawisata sehingga berdampak pada sejumlah kunjungan wisatawan nusantara dan akan semakin bergeliat dunia usaha dan semakin sejahtera masyarakat secara merata melalui aktifitas positif parawisata.
4. Discount tiket domestik yang bisa dimanfaatkan wisatawan nusantara secara rata rata 51,44 % untuk 25 % dari kapasitas tempat duduk di bulan Maret, April dan Mei 2020 dan Kebijakan ini berlangsung 3 bulan dengan tujuan Destinasi wisata 5 Prioritas Wisata Dunia: Danau Toba, Likupang, Labuhan Bajo, Borobudur, Mandalika.	
5. Mendorong pergerakan wisatawan nusantara dengan terus melakukan kampanye promosi wisata dalam negeri dan mendorong dilakukannya pertemuan pertemuan dari instansi pemerintah dan korporasi di destinasi wisata dalam negeri dan mempromosikan even even Internasional agar di selenggarakan di Indonesia	

Sumber Data : Kementerian Parawisata & Ekonomi Kreatif dan Hasil Olahan Peneliti sebagai Pelaku Usaha di bidang Parawisata Perhotelan.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sangat rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Eskalasi COVID-19 dan perlambatan ekonomi yang tajam harus dimitigasi dampaknya pada kesejahteraan masyarakat – melalui kebijakan *extraordinary*. Dengan

berbagai langkah *extraordinary*, Pemerintah berupaya menjaga agar pertumbuhan dan dampak kesejahteraan tidak menuju pada skenario sangat berat (depresi).

Tabel 6. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 Skenario Berat dan Sangat berat Proyeksi pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 2020 dapat di lihat pada daftar tabel berikut ini

SKENARIO	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (%)	Dampak Sosial Penurunan Pertumbuhan Ekonomi (Jutaan) orang Pengangguran	Dampak Sosial Penurunan Pertumbuhan Ekonomi (Jutaan) orang Kemiskinan
BERAT	2,3	+2,92	+1,89
SANGAT BERAT	-0,4	+5,23	+4,86

Data : Sumber Kementerian Keuangan (2020)

Wabah Pandemi Coronavirus disease 2019 menjadi tantangan bagi Indonesia karena mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi dan produktifitas tenaga kerja, dan pemutusan hubungan kerja yang terdampak wabah pandemi dan yang di rumahkan sebanyak 3,05 juta orang terkena PHK. Dari data BPS 2020 disebutkan bahwa pekerja yang terkena

pemutusan hubungan kerja PHK akibat tempat usaha ditutup sebesar 2,52 persen dan yang dirumahkan tetapi masih bekerja sebesar 18,34 persen . Dalam kurun waktu Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2020 jumlah angkatan yang menganggur telah bertambah sebanyak 2,67 juta orang atau meningkat sebesar 37,61 persen (Data BPS 2020)

Tabel 7. Postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020

Postur APBN 2020	Trilyun
Penerimaan Pajak	1.865,7 Trilyun
Penerimaan Negara Bukan Pajak	367,0 Trilyun
Penerimaan Hibah	0,5 Trilyun
Belanja Pemerintah Pusat	1.683,5 Trilyun
Transfer ke Daerah dan Dana desa	856,9 Trilyun

Sumber Data : Kementerian Keuangan 2020.

Adapun Postur APBN 2020

- * Penerimaan Pajak : 1.865,7 Trilyun
- * Penerimaan Negara Bukan pajak : 367,0 Trilyun
- * Penerimaan Hibah : 0,5 Trilyun
- * Belanja Pemerintah Pusat : 1.683,5 Trilyun
- * Transfer ke Daerah dan Dana Desa : 856,9 Trilyun

Keseimbangan Primer	Devisit anggaran % terhadap PDB	Pembiayaan Anggaran
(0,5 T)	((307,2T) (1,76)	307,2 T

Sumber Data : Kementerian Keuangan 2020

Menurunnya pendapatan rumah tangga dan pendapatan usaha akibat wabah COVID-19 akan menurunkan penerimaan pemerintah (baik pusat maupun daerah) sehingga akan meningkatkan defisit anggaran pemerintah. Pada masa pandemi COVID-19, menurunnya aktivitas perekonomian baik itu dari sisi permintaan rumah tangga maupun produksi perusahaan akan menurunkan penerimaan pajak pemerintah pusat maupun daerah. Sementara, untuk menahan pelemahan ekonomi lebih dalam akibat wabah COVID-19 dan mempercepat proses pemulihan ekonomi, pemerintah harus memberikan stimulus kepada masyarakat maupun dunia usaha. Meningkatnya pengeluaran pemerintah untuk stimulus, sementara penerimaan mengalami penurunan menyebabkan defisit anggaran pemerintah akan mengalami peningkatan.

Dengan demikian bahwa Negara hadir untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui :

1. Pemberian jaring pengaman sosial (safety net) melalui kebijakan upah minimum dengan sistem formula untuk memastikan buruh tidak jatuh kedalam upah murah
2. Pengurangan beban pengeluaran hidup melalui kebijakan sosial melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, perumahan, transportasi, hingga Kredit Usaha Rakyat
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap berlangsungnya dialog sosial bipartit antara pengusaha dengan pekerja

Sejumlah program yang telah disiapkan pemerintah salah satunya adalah program hibah pariwisata yang merupakan bagian dari program PEN yang pada tahun lalu telah terserap 70 persen untuk hotel dan restoran. Pada 2020, dana hibah pariwisata yang merupakan bagian dari program PEN tercatat sebesar Rp3,3 triliun. Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan berbagai program stimulus dalam rangka PEN yang sudah berjalan tahun lalu, seperti misalnya subsidi bunga, restrukturisasi kredit dan KUR Pariwisata.

Tujuan Dana Hibah Pariwisata

Anggaran untuk dana hibah pariwisata sebesar Rp3,3 Triliun yang melibatkan 101 daerah kabupaten/kota di Indonesia. Adapun tujuan utama dari hibah pariwisata ini adalah membantu pemerintah daerah serta industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta recovery penurunan pendapatan asli daerah (PAD) akibat pandemi Covid-19 dengan jangka waktu pelaksanaan hingga Desember 2020.

Sasaran dan Kriteria Penerima Dana Hibah Sektor Pariwisata Hotel dan Restoran Dana hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah dibagi dengan imbalan 70 persen dialokasikan untuk bantuan langsung kepada industri hotel dan restoran. Sedangkan 30 persen untuk pemerintah daerah digunakan untuk penanganan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi COVID-19 terutama pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Adapun penerima dana hibah pariwisata untuk pemda adalah

1. Daerah dengan kriteria PPHR minimal 15 persen dari total PAD Tahun anggaran 2019
2. Masuk 5 Destinasi Kawasan Super Prioritas Nasional (KSPN)
3. Masuk 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)
4. Daerah Destinasi Branding dan 100 COE

Kriteria untuk industri Hotel dan Restoran

1. Terdaftar di data base pajak daerah
2. Masih beroperasi hingga saat ini
3. Memiliki izin usaha / Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

Dana Hibah berupa uang yang diserahkan ke rekening pemilik hotel dan restoran secara langsung jumlah dana yang diterima setiap hotel dan restoran secara proporsional besarnya tergantung dari jumlah pajak yang dibayar ke daerah sejak 2019. Masing-masing berbeda, ada perhitungan yang dihitung dari pusat kontribusi besaran hotel dan restoran yang membayar pajak. Ada yang Rp1 juta sampai Rp2 miliar lebih. Dana hibah pariwisata ini

sebagai salah upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Sebab salah satu industri usaha yang terdampak pandemi COVID-19 ini adalah hotel dan restoran, sehingga hotel dan restoran diberikan insentif. Karena ketika pandemi, usaha hotel dan restoran banyak yang bangkrut dan tidak hidup. Adapun hotel dan restoran memiliki perizinan berusaha yaitu Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku. Selain itu, syarat lainnya adalah industri usahanya masuk di dalam daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) hotel dan restoran.

Adapun Dana Hibah yang di terima oleh Pelaku Usaha di Indonesia tergantung seberapa besar Pajak di Setor setiap bulan kepada negara, misalnya Usaha yang setoran pajaknya setiap bulan 500.000 rupiah hingga 2.Milyard Rupiah di Sumatera Utara , maka para pelaku Usaha akan mendapatkan Nilai Hibah sebesar 1 Bulan Pajak yang di berikan oleh Pemerintah, demikian juga Pajak mendapat pengurangan bagi pelaku Usaha.

Kebijakan Stimulus Pemerintah

Melalui UU No.2/2020 Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tahun 2020 dengan nilai realisasi Rp579,8 triliun.

Pada tahun 2021, kerangka pemulihan ekonomi terpusat pada tiga hal yaitu pertama, intervensi kesehatan melalui vaksinasi gratis dan disiplin dalam penerapan protokol Covid-19. Kedua *survival and recovery kit* untuk menjaga kesinambungan bisnis, serta ketiga reformasi struktural melalui UU No. 11/2020 tentang UU Cipta Kerja. Selain itu, APBN didesain sebagai upaya untuk kembali mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di dalam APBN, terdapat anggaran PEN yang meningkat 22 persen menjadi Rp699,43 triliun, yang menyasar kesehatan sebesar Rp176,30 triliun, dukungan sosial sebesar Rp157,41 triliun, dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp184,83 triliun, insentif usaha sebesar Rp58,46 triliun serta Rp122,44 triliun untuk

dukungan program prioritas. Lima program tersebut diarahkan untuk menjadi *game changer* di tahun 2021.

Kesimpulan

Kebijakan Pemerintah yang di keluarkan saat merebaknya Wabah Pandemi Corona Virus Disease Tahun 2019 di singkat dengan (COVID -19) yang melanda China- Wuhan dan Dunia tidak terkecuali Indonesia di rasa sangat efektif, namun sejumlah kebijakan tersebut tidak dapat di rasakan secara langsung semuanya perihal dampak positifnya, hal ini dikarenakan secara berjangka kedepannya. Dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia menyusun segala Kebijakan yang bertujuan agar masyarakat merasakan Kesehatan Kesejahteraan, Kemakmuran, dan Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bidang Kesehatan : ditemukannya vaksin, obat, serta keterbatasan alat dan tenaga medis Penyebaran COVID-19 yang mudah, cepat, dan luas menciptakan krisis kesehatan. Bidang Ekonomi : Kinerja ekonomi menurun tajam: konsumsi terganggu, investasi terhambat, ekspor-impor berkontraksi. Pertumbuhan ekonomi melambat/ menurun tajam. Bidang sosial : Langkah untuk *flattening the curve* dari cepat dan luasnya penularan memiliki konsekuensi pada: berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor, tak terkecuali sektor-sektor informal. Bidang Keuangan : Volatilitas dan gejolak sektor keuangan dirasakan seketika sejak wabah muncul seiring dengan turunnya *investor confidence* dan terjadinya *flight to quality* Disamping itu, sektor keuangan juga terdampak melalui kanal menurunnya kinerja sektor riil, di mana NPL, profitabilitas dan solvabilitas perusahaan mengalami tekanan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 yang semakin meluas berdampak negatif pada produktivitas tenaga kerja sektor jasa pariwisata perhotelan. Pandemi tersebut meningkatkan risiko kesehatan bagi masyarakat dan tenaga kerja sehingga mengurangi kegiatan/bekerja dan mengganggu arus kunjungan wisatawan, Di samping itu,

pandemi Covid-19 meningkatkan beban pengeluaran terkait perlindungan kesehatan dan menimbulkan kerugian pengusaha dan pendapatan tenaga kerja Program Pemulihan Ekonomi Nasional PEN 2020 dalam sektor Parawisata di gelontorkan sebesar 3,3 trilyun rupiah dari Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif, Program Bantuan Sosial berupa Program Bantuan Relaksasi Pembayaran Angsuran dan Pemberian Subsidi Bunga Kredit yang di salurkan melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan Bantuan Dana Hibah Sejumlah Hotel dan Restoran yang mendapatkan Dana Hibah Parawisata dari Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif adalah Bagi Pelaku Usaha yang menyetor Pajak pada Tahun 2019. Adapun Pelaku Usaha yang menerima Insentif Dana Hibah dari Pemerintah Daerah mulai dari Rp.500.000 hingga mencapai 2 Milyard Rupiah, tergantung seberapa banyak Pajak setiap bulan yang di setor ke Negara.

Sebagai Warga negara Indonesia Yang Baik kita dapat membantu Pemerintah dengan Cara mengikuti segala Kebijakan Protokol Kesehatan (Prokes), *Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability* CHSE/ Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, Kelestarian Lingkungan, 3M, 5M agar Masyarakat terhindar dari Wabah Pandemi Corona Virus Disease COVID 19 untuk menyongsong masyarakat yang *Welfare*.

Daftar Pustaka

- Adam, L.(2016) Membangun Daya Saing Tenaga kerja Indonesia melalui produktifitas. *Jurnal Kependudukan Indonesia* 11 (2). 71-84
- Badan Pusat Statistik 2019, 2020, 2021, Survei Hotel ,Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif 2019, 2020, 2021.
- Baker, P., White, A., & Morgan, R. (2020). Men's health: COVID-19 Pandemi highlights need for overdue policy action. *The Lancet*, 395(10241), 1886–1888. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31303-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31303-9)
- Betty Pfefferbaum, M.D., J.D., and Carol S. North, M.D., M. P. E. (2020). Mental Health and the Covid-19 Pandemi. *New England Journal of Medicine*, 383(6), 508–510. <https://doi.org/10.1056/nejmp2013466>
- Carter, D. P., & May, P. J. (2020). Making sense of the U.S. COVID-19 Pandemi response: A policy regime perspective. *Administrative Theory and Praxis*, 42(2), 265–277. <https://doi.org/10.1080/10841806.2020.1758991>
- Sekretariat Kabinet 2021 Dana Pemulihan Ekonomi Nasional, website : <https://setkab.go.id>
- Simanjuntak,P. (2000). Pengantar Ekonomi Manusia, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Soekarjo,2002 Anatomi Parawisata (memahami parawisata sebagai System linkage) Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Sukirno,S.1985, Ekonomi Pembangunan, Penerbit Fak.Ekonomi Yokyakarta, Yokyakarta.
- Thaha, A. F. 2020. Dampak COVID-19 Terhadap UMKM Di Indonesia. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 2(1), 147–153
- Todaro, P.M. 1998 Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga. Terjemahan, Erlangga, Jakarta.